

**EFEKTIVITAS PELAYANAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA OLEH DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM
MENGENDALIKAN ANGKA KELAHIRAN DI KOTA KUPANG**

Yanuaris David Ndau

NPP. 29.1341

Asdaf Kota Kupang, Provinsi NTT

Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: yandavidndau@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Family planning program services are a way out of the problem of birth rates so that effective service providers are needed so as to provide satisfaction to the community, especially in family planning services. Family planning program services to the community sometimes have weaknesses so that public understanding becomes less and there are services that do not reach all regions. This is the basis for the government to increase effectiveness and create innovations to improve the performance of family planning services to the community.

Purpose : this research is to find out and analyze the effectiveness of family planning program services and the inhibiting factors as well as the efforts made by the Department of Population Control and Family Planning in overcoming the obstacles that occur in family planning program services in Kupang City. **Method :** used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. **Results :** research conducted, the effectiveness of the Family Planning Program Service by the Kupang City Population Control and Family Planning Service is quite good, but not yet effective because it has several obstacles such as very binding customs, lack of field officers and lack of budget. **Conclusion :** this study is that there must be an improvement in the service system, coordination from local governments and an increase in the number of employees. Researchers recommend good coordination with regional leaders so that an adequate budget can be provided and the addition of field officer personnel to improve services for the better.

Keywords: *Effectiveness, Services, Family Planning Program*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Pelayanan program KB adalah jalan keluar dari pemasalahan angka kelahiran sehingga dibutuhkan pelayan yang efektif sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat terutama dalam pelayanan KB. Pelayanan program KB kepada masyarakat terkadang memiliki kelemahan sehingga pemahaman masyarakat menjadi kurang dan adanya pelayanan yang tidak menjangkau semua daerah. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan menciptakan inovasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan KB kepada masyarakat. **Tujuan:** Tujuan penelitian dilakukan adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelayanan program KB dan faktor penghambat serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada pelayanan program KB di Kota Kupang. **Metode:** Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil:** hasil penelitian yang dilakukan, Efektivitas Pelayanan Program KB oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang sudah cukup baik, namun belum efektif karena memiliki beberapa hambatan seperti adat istiadat yang sangat mengikat, kurangnya petugas lapangan dan kurangnya anggaran. **Kesimpulan:** dari penelitian ini adalah harus adanya peningkatan sistem pelayanan, koordinasi dari pemerintah daerah dan penambahan jumlah pegawai. Peneliti merekomendasi adanya koordinasi yang baik dengan pimpinan daerah sehingga dapat diberikan anggaran yang memadai dan adanya penambahan personil petugas lapangan untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik

Kata Kunci : *Efektivitas, Pelayanan, Program KB*



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu Kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) dengan jumlah penduduk dari hasil sensus penduduk 2020 sebanyak 5,33 juta jiwa. Data ini meningkat 0,64 juta jiwa dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2010 lalu, hal ini mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk Provinsi NTT per tahunnya meningkat 2,06 persen. Meningkatnya pertumbuhan penduduk berhubungan dengan pelaksanaan program pengendalian pertumbuhan penduduk yang semakin melemah. Pertumbuhan penduduk yang tinggi penyebab salah satunya adalah peningkatan angka kelahiran penduduk di NTT. Peningkatan angka kelahiran setiap tahunnya merupakan masalah pokok yang belum bisa di atasi oleh pemerintah pusat dan daerah, pasalnya peningkatan jumlah penduduk ini tidak berbanding lurus dengan peningkatan mutu sumber daya manusia.

Penyumbang terbesar penduduk di Nusa Tenggara Timur berasal dari Kota Kupang dengan jumlah 446 ribu jiwa dan meningkat di setiap tahunnya dan memuncak di tahun 2020. Menurut data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTT Total Fertiliti Rate (TFR) Kota Kupang pada tahun 2020 adalah 3,57 yang artinya dalam satu keluarga memiliki 3-4 orang anak, TFR Kota Kupang ini masih jauh dari TFR nasional yaitu 2,1 per Wanita Usia Subur (WUS). Hal yang menjadi permasalahan dari pemerintah daerah karena angka kelahiran yang besar tidak di dukung dengan fasilitas dan lapangan pekerjaan yang cukup. Akibatnya timbul berbagai masalah sosial di masyarakat seperti kriminalitas, pengangguran, kemiskinan, minimnya akses pendidikan, rendahnya kualitas kesehatan serta kurangnya bahan makan atau gizi buruk. Jumlah penduduk pada salah satu kecamatan di Kota Jayapura yang mengalami peningkatan yang pesat adalah Kecamatan Abepura. Kecamatan Abepura yang memiliki jumlah penduduk 86.521 jiwa pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 22.723 jiwa pada pertengahan tahun 2021 menjadi 109.244 jiwa.

Pemerintah membuat kebijakan untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB) sehingga pemerintah mendirikan sebuah lembaga yang dapat mengatur hal tersebut yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Melalui dibentuknya Lembaga ini pemerintah berharap akan terciptanya Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), yaitu keluarga dengan dua anak saja cukup

Pengendalian jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB) untuk menurunkan angka kelahiran dan mortalitas yang akan berdampak pada peningkatan jumlah penduduk produktif dan lansia, perubahan struktur penduduk, tingkat pendidikan dan menurunnya tingkat ketergantungan. Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTT yang di lansir dalam Pos Kupang 2020, kepercayaan banyak anak banyak rezeki dan keyakinan kalau belum memiliki anak perempuan dan laki-laki maka belum lengkap sehingga mereka akan berusaha terus untuk mendapatkannya, masih dianut oleh banyak keluarga dari Provinsi NTT.

Berdasarkan penjelasan di atas maka batasan masalah terkait pelayanan program KB oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengendalikan angka kelahiran di Kota Kupang dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Masyarakat belum paham akan pentingnya pengendalian angka kelahiran sehingga mereka masih menanamkan budaya-budaya lama. (2) Jumlah Pembina Keluarga Berencana (PKB) tidak sebanding dengan luas wilayah di Kota Kupang dengan rasio 1:6. (3) kurangnya anggaran dalam mendukung pelayanan KB. (4) masih tinggi tingkat pemakain alat kontrasepsi yang tidak konsisten. (5) adanya Pandemi COVID-19 yang berpengaruh

terhadap tingkat partisipasi peserta dalam mengikuti pelatihan. (5) rendahnya kemampuan/penguasaan peserta pelatihan dalam menggunakan aplikasi E-Learning berbasis IT.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Pelayan BKKBN harus menjangkau seluruh daerah di Provinsi NTT maka untuk mengatasi persoalan tersebut dibentuklah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Dinas ini ada di setiap kota dan Kabupaten di Provinsi NTT sebagai bentuk agar pelayan dan penyaluran alat kontrasepsi dapat meluas ke semua daerah, di karenakan Provinsi NTT adalah daerah dengan banyak pulau. DPPKB ini mempunyai tugas yang sama seperti BKKBN yaitu pengendalian penduduk, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga serta mengevaluasi dan melaporkan hasil dari kinerja mereka. Setiap tahun DPPKB Kota Kupang melakukan program Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang merupakan program inti dari dinas ini, namun kinerja yang mereka lakukan masih belum maksimal dilihat dari banyaknya angka kelahiran yang setiap tahunnya meningkat. peningkatan angka kelahiran memberikan gambaran bahwa pelayanan dan kinerja DPPKB Kota Kupang masih belum merata di seluruh daerah.

Berdasarkan data dari BKKBN Provinsi NTT dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 sampai 2020 persentase pasangan KB aktif masih belum mencapai target 90% pada setiap tahunnya dan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dan perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) dengan peserta KB aktif masih terbilang jauh. Artinya bahwa pelayanan KB belum mencapai seluruh daerah di Kota Kupang dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi, sehingga masyarakat tidak takut dan berpartisipasi aktif dalam mengikuti program KB. Berdasarkan laporan kinerja instansi pemerintah perwakilan BKKBN Provinsi NTT terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan pelayanan KB belum optimal diantaranya: Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) tidak sebanding dengan luas wilayah dengan rasio 1:6, tenaga penyuluh KB yang memenuhi standar hanya 75%, masih terdapat fasilitas kesehatan yang belum dimiliki pelayanan KB, masih tinggi tingkat pemakaian alat kontrasepsi yang tidak konsisten, adanya Pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi peserta dalam mengikuti pelatihan dan masih kurangnya kemampuan/penguasaan peserta pelatihan dalam menggunakan aplikasi E-Learning berbasis IT.

1.3. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, terdapat penelitian sebelumnya yang dijadikan penulis sebagai rujukan pada penelitian yang akan diteliti oleh penulis, adalah sebagai berikut :

1.3.1 Penelitian oleh Dewi Suhartini (2019)

Penelitian oleh Dewi Suhartini (2019), yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Provinsi Sulawesi Selatan “ Metode yang di pakai pada penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif deskriptif pendekatan induktif. Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah survei dan wawancara

Dari penelitian ini fakta yang ditemukan di lapangan bahwa di kota Makasar para masyarakat masih kurang menerima konseling sehingga keputusan pemilihan alat/cara KB belum sepenuhnya di dasarkan pada pengetahuan yang cukup. Penelitian Dewi Suhartini menunjukkan bahwa Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB melalui televisi maupun poster/pamflet memperlihatkan pengaruh yang sangat baik terhadap kepesertaan ber KB

1.3.2 Penelitian oleh Dr. Budiman Purba, M.AP (2018)

Penelitian oleh Dr. Budiman Purba, M.AP (2018) yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Dalam Mengurangi Angka Kelahiran di Kota Medan” pada Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif menunjukkan adanya proses analisis untuk mengukur, menghubungkan, dan menghasilkan data penelitian.

Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program oleh Dinas PPKB Kota Medan tidak rutin dilakukan setiap bulan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Prosedur pelaksanaan program dilakukan dengan baik, namun permasalahannya masyarakat yang kurang aktif dalam mengikuti sosialisasi yang diberikan hal ini disebabkan karena tingkat pemahaman dan kepedulian terhadap pentingnya program KB masih minim.

1.3.3 Penelitian oleh Dewi Febriani (2020)

Penelitian oleh Dewi Febriani (2020) yang berjudul “Upaya Pemerintah Dalam Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk, Studi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kota Jambi” pada penelitian yang dilakukan ini Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologi pemerintahan

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini, Program Keluarga Berencana yang di laksanakan BKKBN provinsi Jambi untuk mengendalikan angka kelahiran menghadapi beberapa hambatan seperti: kurangnya petugas lapangan penyuluhan, bertambahnya penduduk, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mempengaruhi unmet need. Dalam mengatasi permasalahan tersebut BKKBN mengambil solusi yaitu: meningkatkan sumber daya manusia khususnya petugas lapangan penyuluhan, menjamin ketersediaan kotrasepsi, meningkatkan akses informasi dan kualitas pelayan. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal pemerintah harus terus membaca permasalahan dan memberikan solusi yang tepat, cepat dan produktif.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Keluarga Berencana melalui program Keluarga Berencana yang merupakan produk pemerintah daerah yang seharusnya memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, metodenya yang digunakan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif juga berbeda dengan penelitian Dewi Suhartini, Dr. Budiman Purba, M.AP, maupun Dewi Febriani.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas pelayanan Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Kupang dalam mengendalikan angka kelahiran penduduk di Kota Kupang.

II. METODE

Dalam melakukan penelitian ini berkaitan dengan judul efektivitas pelayanan Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Kupang dalam mengendalikan angka kelahiran penduduk di Kota Kupang, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan permasalahan atau kasus yang dikemukakan berdasarkan fakta yang ada kemudian diteliti dan ditarik kesimpulan.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 13 orang informan yang terdiri dari kepala Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Plt

Sekretaris/ Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk penyuluhan dan Penggerakan, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Staf Unit pelaksana Teknis Dinas, dan masyarakat (dalam hal ini berjumlah 6 orang). Adapun pengumpulan data Kuantitatif dilaksanakan dengan menyebarkan angket terhadap 50 orang yang memanfaatkan lorong literasi Paccinongang. Adapun analisisnya menggunakan teori Miles dan Huberman , yaitu analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/ verification..

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang melaksanakan program keluarga berencana (KB) untuk menekan angka kelahiran, meningkatkan pemakaian alat kontrasepsi, meningkatkan penduduk usia produktif, dan mewujudkan keluarga yang sejahtera demi menyambut bonus demografi. Peningkatan pelayanan program Keluarga Berencana (KB) sesuai Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengendalian penduduk serta pelaksanaan keluarga berencana yang sejahtera dan pelayanan publik.

3.1 Pasangan Usia Subur yang Menjadi Peserta KB aktif

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang melakukan edukasi dan informasi kepada masyarakat Kota Kupang untuk menjadi peserta KB aktif sebagai cara mengendalikan angka kelahiran. Sasaran utama dari dinas adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang memiliki umur 20 – 45 tahun. Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah mengajak dan menyuluh kepada masyarakat untuk mengantisipasi peningkatan unmet need (kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi) di masyarakat Kota Kupang.

Tabel 1

Pasangan Usia Subur yang Menjadi Peserta KB aktif di Kota Kupang Tahun 2021

No	BULAN	PUS	UNMET NEED	PA	%
1	2	3	4	5	6
1	JANUARI	49.031	15.121	33.910	69,16
2	FEBRUARI	49.120	14.951	34.169	69,56
3	MARET	49.509	12.354	37.155	75,04
4	APRIL	49.694	13.736	35.958	72,35
5	MEI	49.560	13.021	36.539	73,72
6	JUNI	49.754	11.520	38.234	76,84
7	JULI	49.921	9.931	39.990	80,11
8	AGUSTUS	49.845	10.636	39.209	78,66
9	SEPTEMBER	49.749	9.388	40.361	81,12
10	OKTOBER	49.832	9.108	40.724	81,72
11	NOVEMBER	49.859	9.013	40.846	81,92
12	DESEMBER	49.972	7.901	42.071	84,18

sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang, 2021

Berdasarkan tabel 1 di ketahui bahwa unmet need (kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi) pada tahun 2021 mengalami penurunan setiap bulannya sehingga mempengaruhi jumlah pasangan usia subur (PUS). walaupun pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (PA) belum mencapai angka 90% sesuai target dinas dan BKKBN. Namun data tersebut menunjukkan peningkatan yang baik dari kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang.

3.2 Penyebaran Alat Kontrasepsi

Penyebaran alat kontrasepsi kepada masyarakat Kota Kupang yang disebarakan lewat PKB (Pembina Keluarga Berencana) di tiap keluarahan lewat pemasangan alat kontrasepsi yang di lakukan di Puskesmas.

Tabel 2

Penyebaran Alat Kontrasepsi di Kota Kupang Tahun 2021

NO	KECAMATAN	PENGGUNAAN KONTRASEPSI						
		MOP	MOW	IUD	IMPLT	STK	PIL	KDM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	OBOBO	21	671	1.661	1.797	2.935	509	96
2	KELAPA LIMA	5	328	1.266	1.744	4.215	1.143	183
3	MAULafa	12	819	780	1.249	2.948	479	267
4	ALAK	15	399	754	1.288	2.859	683	157
5	KOTA LAMA	2	252	287	216	1.281	247	79
6	KOTA RAJA	22	367	797	879	1.383	363	110
	KOTA KUPANG	77	2.836	5.545	7.173	15.621	3.424	892

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang, 2021

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa Angka peserta KB aktif yang menggunakan alat kontrasepsi yang paling sering digunakan adalah KB suntik sebanyak 15.621 dan yang paling sedikit adalah KB MOP (Metode Operasi Pria) sebanyak 77. Dari data ini dapat diketahui bahwa keikutsertaan pria dalam ber-KB masih kurang. Masyarakat Kota Kupang terutama laki-laki memang kurang berpartisipasi untuk menjadi peserta KB aktif, mereka lebih banyak menyuruh istri mereka untuk menggunakan alat kontrasepsi karena tidak mau repot. Laki-laki juga tidak menggunakan alat kontrasepsi karena di rasa melemahkan jenis kelamin mereka, Contohnya operasi vaksetomi yang menurut anggapan mereka membuat mereka tidak dapat berhubungan badan dengan istri mereka. Dapat di simpulkan bahwa peran dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengajak masyarakat menjadi peserta KB aktif dan penyebaran terhadap alat kontrasepsi sehingga unmet need dapat terpenuhi, Sudah dapat dikatakan efektif walaupun masih ada beberapa masyarakat yang belum paham akan penggunaan alat kontrasepsi.

3.3 Ketepatan Waktu Pelayanan KB

Pelayanan KB dilakukan secara administratif dan ditindaklanjuti secara medis dengan cepat dan tepat. Terkait dengan hal tersebut, pasien yang datang untuk mengganti alokon karena muncul efek samping yang tidak diinginkan dengan metode baru, dapat dikatakan sebagai suatu alternatif. Pelayanan ganti alokon langsung dilaksanakan di faskes yang tersedia, bisa di Pukesmas dan di Klinik KB melalui pelayanan Bidan ataupun pada momen pelayanan KB secara jemput bola. Pelayanan KB bersifat

segera saat pasien mengajukan pergantian sesuai dengan prosedur yang ada. Adanya BPJS dan KTP juga meningkatkan sistem administrasi yang berbelit-belit bagi masyarakat miskin saat registrasi pelayanan KB. Pelayanan KB dilakukan, berjalan dalam waktu yang relatif singkat, baik dikarenakan ketidaksesuaian metode KB yang dipakai oleh masyarakat sebelumnya, maupun dalam segi administrasinya. Demikian halnya yang disampaikan oleh ibu Cornelia Erlince Yang merupakan Peserta KB aktif dalam wawancara yang dilakukan penulis tanggal 15 Januari 2022, terkait teknis pelayanan ganti metode KB sebagai berikut: “Saya selaku pasien pelayanan KB merasa senang dengan pelayanan ganti metode kontrasepsi karena dilakukan dengan cepat. Sebelumnya saya disetujui suami untuk menggunakan KB suntik 3 bulan selama 2 tahun. Namun efek sampingnya buat badan saya jadi gemuk dan menstruasi sering tidak teratur. Bidan di pustu pun menyarankan saya untuk ganti metode KB Implant, langsung ditangani diruang pelayanan KB dalam waktu yang singkat. Saya merasa puas dan menerima pengalaman ber-KB yang lebih baik daripada KB suntik”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut memperlihatkan kepuasan masyarakat akan pelayanan KB dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang berjalan dengan cepat dan akurat. Hal ini dikarenakan keluhan yang dialami pasien menjadi pedoman teknis pelaksanaan untuk direkomendasikan metode KB yang meminimalisir efek samping sebelumnya dan juga menemukan kecocokan pada hormon tubuh pasien. Ini berpengaruh pada kepuasan PUS dalam mengikuti program KB dan tidak melakukan drop out. Perlu diperhatikan bahwa Program KB memang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung kecocokan dan pilihan dari PUS itu sendiri. Penanganan efek samping yang timbul menjadi sarana menyalurkan solusi dalam mengatasi masalah pelayanan KB. Ketepatan waktu dalam pelayanan sudah dimiliki dinas untuk mengatasi problem solver (pemecah masalah) secara cepat dan tepat.

3.4 Target Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang

Target dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang adalah menurunkan laju pertumbuhan penduduk, menurunkan angka kelahiran total (TFR), meningkatkan pemakaian kontrasepsi, menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dan meningkatkan remaja berpengetahuan tentang generasi berencana. Untuk saat ini target yang kami buat belum tercapai sepenuhnya karena adanya beberapa kendala tetapi kami akan terus berupaya untuk mengoptimalkan kinerja kami. Dari beberapa target tersebut dinas memiliki target inti yang ingin di capai adalah menurunkan TFR 3,5 menjadi 2,5 dan meningkatkan pemakaian kontrasepsi dari 84% menjadi 90%. Hal ini bukanlah hal yang mudah, harus membutuhkan kerja sama dari semua SDM yang ada baik dari Dinas, PKB, dan Puskemas. Target ini juga harus membutuhkan pemanfaatan dari anggaran, sarana dan prasarana secara optimal.

3.5 Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan KB

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang mengedepankan kepuasan masyarakat sebagai tujuan utama pelayanan mereka sehingga akan adanya rasa ketertarikan yang berlanjut terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Untuk mengetahui secara langsung tentang kepuasan masyarakat dalam pelayanan program KB terkhususnya bagian penyuluhan maka dari itu peneliti melakukan observasi pada tanggal 20 Januari 2022 di Kelurahan Lasiana untuk melihat proses penyuluhan dari PKB di kelurahan Kelapa Lima. Persiapan untuk melakukan

peyuluhan secara langsung kepada masyarakat di persiapkan dengan baik terbukti adanya pemaparan materi, warga yang hadir sebagai peserta KB aktif ada yang bertambah dan proses penyuluhan diikuti sampai selesai telah membuktikan adanya rasa tertarik dan puas akan pelayanan yang di berikan oleh petugas lapangan.

Hasil evaluasi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang mengenai tingkat kepuasan dari masyarakat terhadap pelayanan program KB di lihat dari beberapa bulan belakangan ini mulai dari tahun 2021 pertengahan hingga 2022 terjadi respon yang baik dari masyarakat terhadap pelayanan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang, PKB dan Puskesmas. Hal ini bisa terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat maupun dari pemerintah itu sendiri, setiap kali dinas melakukan pelayanan program KB kepada masyarakat, mereka selalu menampung masukan atau saran terhadap kinerjanya, hal inilah yang mungkin dirasakan masyarakat bahwa pemerintah juga membutuhkan pendapat mereka sebagai objek pelayanan kedepan.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program Keluarga Berencana memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat di era pandemi Covid – 19 dalam rangka pemulihan ekonomi. Program Keluarga Berencana merupakan cara pemerintah Kota Kupang untuk mengendalikan angka kelahiran terutama pada saat Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan peningkatan angka kelahiran karena banyaknya aktivitas yang di lakukan di rumah. Penulis menemukan temuan penting yakni terjadinya peningkatan masyarakat usia subur yang menjadi peserta KB. Sama halnya dengan temuan Dewi Suhartini dimana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makasar melakukan pelayanan yang lebih baik dimana mereka menjemput masyarakat langsung ke kelurahan kemudian mengantarkan ke Puskesmas terdekat.

Seperti halnya program pemerintah lainnya, program KB di Kota Kupang juga memiliki kekuarangan, diantaranya kurangnya jumlah petugas pelayanan program KB di Kota Kupang yang merupakan elemen penting dalam melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat, mereka merasa kewalahan dengan wilayah yang menjadi tanggungjawabnya yang tak sebanding dengan jumlah mereka, layaknya penelitian Dewi Febriani. Selanjutnya hambatan yang sangat besar adalah adat istiadat patrilineal yang tertanam di Kota Kupang yang mencari keturunan anak laki-laki sebagai penerus marga (nama keluarga) sehingga mereka akan berusaha mencarinya walaupun sudah memiliki 3 orang anak perempuan. Hal ini sama dengan temuan Budiman Purba yang dilakukan di Kota Medan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang melakukan upaya untuk mengatasi hambatan diantaranya, memanfaatkan media sosial seperti *Whatsapp* dan *Youtube* dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat peserta KB aktif. Dengan bantuan *Whatsapp* koordinasi antara petugas pelayanan dan masyarakat lebih baik dan efisien sehingga apa bila terjadinya penjemputan masyarakat tidak kebingungan. Hal ini sama dengan temuan dari Dewi Suhartini. Selanjutnya dinas juga melakukan sosialisasi di tingkat SMA dan Universitas untuk mengatasi adat istiadat patrilineal yang masih ditanamkan sehingga para siswa dan mahasiswa yang nantinya menjadi peserta KB aktif akan memiliki *mindset* yang baik terkait dengan pengendalian angka kelahiran dan manfaat mengikuti program KB yang tidak hanya untuk kesehatan ibu dan bayi tetapi demi menyambut bonus demografi.

Adanya program KB ini diharapkan masyarakat Kota Kupang dapat mengikutinya bukan saja bersifat sementara tetapi berlanjut sampai usia tua dan peserta KB aktif bukan hanya perempuan tetapi laki-laki juga dapat berperan aktif. Program KB merupakan program yang sudah lama dilakukan di

Indonesia tetapi sampai sekarang masih saja ada orang yang belum paham hal tersebut sehingga harapan kedepan dengan berbagai upaya pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tidak hanya diterima oleh satu pihak melainkan dapat dibagikan kepada masyarakat lainnya dan dapat mengajak satu dengan lainnya untuk berperan aktif mengikuti program KB.

IV. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan program Keluarga Berencana Oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanan Kota Kupang untuk mengendalikan angka kelahiran di Kota Kupang belum berjalan seperti yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan karena dalam pelaksanaannya program KB mengalami hambatan seperti: Adat istiadat yang masih kental tentang sistem patrilinear, Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program KB, Kurangnya jumlah PKB di Kota Kupang, dan Kurangnya alokasi anggaran dari pemerintah Kota Kupang. Untuk mengatasi hambatan tersebut dinas melakukan beberapa upaya diantaranya: Bekerja sama dengan Lembaga pendidikan di tingkat SMA dan Universitas, Memanfaatkan Sosial Media dalam Sosialisasi sehingga mengurangi anggaran yang ada dan lebih efisien, Menggunakan Pendekatan Skala Prioritas pada Pembinaan KB untuk mengatasi kekurangan jumlah PKB di tiap kelurahan dan menambah jumlah anggaran yang dialokasikan dari pemerintah Kota Kupang walaupun belum terealisasi.

Keterbatasan Penelitian. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dalam isi maupun sistematikanya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan wawasan dari penulis. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan penelitian ini.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari bahwa temuan yang dilakukan belum sempurna oleh karena itu penulis berharap adanya penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program KB di Kota Kupang untuk mendapatkan penelitian yang lebih baik.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih terutama kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta semua pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Hatmaji, S. 2004. Fertilitas Dalam Dasar-dasar Demografi. Jakarta: LDFFE.UI.hal.57

Mantra, I. B. 2010. Demografi Umum. Bandung: Pustaka Umum.

Mulyawan, R. 2016. Birokrasi dan Pelayanan Publik. Bogor: Unpad Press.

Munir, R. 1984. Teknik Demografi. Jakarta: Radar Jaya Offset.hal.14

Robbins, Stephen P. 1994. Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi. Alih Bahasa Jusuf Udayana. Jakarta: Arcan

Sari, E. 2007. Pertumbuhan dan Efektivitas Organisasi. Jakarta: Jaya Baya University Press.

Sugiyono. 2013. METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R & D. Bandung: Alfabeta.

Sumaryadi. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama Media.

B. SKRIPSI DAN JURNAL

Febriani, D. 2020. UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGENDALIKAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KOTA JAMBI.

Purba, B. 2018. Efektivitas Pelaksanaan Progra di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Dalam Mengurangi Angka Kelahiran di kota Medan.

Makmur, S. 2016. Pelaksanaan Keluarga Berencanaan (KB) Terhadap Tingkat . Jurnal Ilmiah Pendidikan Geografi, hlm. 56.

Rahma, D. A. 2011. Tingkat Fertilitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 6, No. 3, Desember 2011, 117-125.

Soleha, S. 2016. Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa . ejournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4, No.1,2016.

Suhartini, D. (2019). Efektivitas Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Provinsi Sulawesi Selatan .

Suwaryo, U. 2010. PERUBAHAN SOSIAL DAN DINAMIKA PEMERINTAHAN. governance, Vol. 1, No. 1, November 2010, 22-31.

C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Paska Keguguran
5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomer 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah Kota Kupang.
6. Peraturan Walikota Kupang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang.

7. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penulisan Karya Ilmiah Program Sarjana Terapan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

D. SUMBER LAIN

<https://kupangkota.bps.go.id/subject/12/kependudukan.htm>, diakses 26 Agustus 2021

<https://pusdatin.kemkes.go.id/Angka-Kelahiran-tahun-2019>, diakses 26 Agustus 2021

<https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-ajak-semua-pihak-untuk-menekan-tingginya-angka-kelahiran-stunting-dan-gizi-buruk-di-ntt>, diakses 27 Agustus 2021

[Pos-kupang.com\(tribunnews.com\)-Kepala BKKBN Provinsi NTT: Keluarga Harus Memiliki Perencanaan yang Matang](https://pos-kupang.com(tribunnews.com)-Kepala-BKKBN-Provinsi-NTT-Keluarga-Harus-Memiliki-Perencanaan-yang-Matang), diakses 27 Agustus 2021

www.bkkbn.ntt.go.id-Laporan-Kinerja-Instansi-Pemerintah-2020, diakses 27 Agustus 2021

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang Tahun 2021

